



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ZEPHERINA MARIA SRI SUMARYANTI
NIK : 3374106608660001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Kerja : UNIT PENILAIAN KOMPETENSI ASN
Jabatan : KASI PENILAIAN KOMPETENSI
Jenis Laporan : Periodik - 2018
Tanggal Kirim : 1 Februari 2019

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap
 Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : UNIT PENILAIAN KOMPETENSI ASN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZEPHERINA MARIA SRI SUMARYANTI
2. Jabatan : KASI PENILAIAN KOMPETENSI
3. NHK : 218066

II. DATA HARTA

| | | |
|--|-----|-------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 145.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | --- |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 16.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 1.275.832 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 162.275.832 |
| III. HUTANG | Rp. | 13.770.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 148.505.832 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.